



PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TERHADAP MASYARAKAT

Riky Soleman¹, Basaria Nainggolan²

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia

² Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate)
Jl. Lumba-Lumba, Kota Ternate, Maluku Utara, 97727, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Riky Soleman

E-mail: lkysoleman26@gmail.com

Abstract

The Department of Industry and Trade is a community empowerment institution. Empowerment has been carried out in various forms and variations, it has the aim of directing people's lives towards a better direction, because the main goal of empowerment is the achievement of community welfare, besides that the task of the agency is as an organizer. This public service is intended to provide services to the community based on community needs. This research is a descriptive qualitative field research with primary data collection through in-depth interviews with employees of the Department of Industry and Trade of the Yogyakarta Special Region Government study, while secondary data is obtained from various literatures such as books and journals. The results of this study are the presence of the Department of Industry and Trade to provide benefits by providing guidance to the community, conducting training with these business actors from the production and marketing aspects in terms of providing facilitation to increase the use of technology for business actors to help provide equipment provided to them with the intention of being able to increase the volume of their production, then increase from the market aspect the agency provides for the public to participate such as exhibition events both locally, nationally and internationally, the agency also organizes exhibitions to include them so that their ability to market products is further increased. We do this to increase the community's production business.

Keywords: Role; Department of Industry and Trade; Society

Abstrak

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat pemberdayaan selama ini dilakukan dengan berbagai bentuk dan variasinya, hal itu memiliki tujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, selain itu tugas dari instansi tersebut adalah sebagai penyelenggara layanan public hal ini dimaksudkan untuk memberikan

layanan kepada masyarakat yang berbasiskan pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan studi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal-jurnal. Hasil penelitian ini adalah dengan hadirnya lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan manfaat dengan pembinaan kepada masyarakat, melakukan pelatihan dengan pelaku usaha tersebut dari aspek produksi maupun pemasaran dalam hal memberikan fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha untuk membantu memberikan peralatan diberikan kepada mereka dengan maksud dapat meningkatkan volume produksi mereka, kemudian peningkatan dari aspek pasar instansi memberikan kepada masyarakat untuk megikutsertakan seperti iven-iven pameran baik local, nasional maupun internasional instansi juga menyelenggarakan pameran untuk mengikutsertakan mereka agar kemampuan memasarkan produk lebih meningkat. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan usaha produksi masyarakat.

Kata kunci: Peran; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Masyarakat

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Dalam hal ini akar kemiskinan diidentifikasi karena terbatasnya akses kesempatan kerja (Pradana et al., 2012). Dari akar permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi, jumlah pengangguran serta kemiskinan tentunya akan semakin bertambah.

Sebelum pasar barang dan jasa dibentuk secara moderen, kegiatan transaksi tersebut masih bersifat sangat sederhana misalnya yang kita ketahui yaitu barter. Transaksi ini dilaksanakan dengan metode tukar menukar barang atau pertemuan secara langsung antara pihak yang mempunyai dana (*surplus*) dan pihak yang membutuhkan dana (*devisit*). Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Hadirnya pihak perantara tersebut, baik dalam pengertian lembaga maupun fisik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian (Jamal Wiwowo, 2014).

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan keuangan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan

penghimpunan dan penyalruan dana masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Walaupun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan dalam membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut bukan berarti membatasi perusahaan. Karena kenyataannya kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dapat diperuntukkan kepada investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Jamal Wiwowo, 2014).

Secara umum sering dipahami bahwa lembaga keuangan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, hal yang membedakan keduanya yaitu pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat menghimpun dana masyarakat secara tidak langsung (Jamal Wiwowo, 2014).

Lembaga keuangan yaitu suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) merupakan perantara pendukung yang sangat dibutuhkan untuk menjunjung kelancaran perekonomian. lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit devisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara keduanya baik pemilik dana dan pemakai dana dengan melalui pasar uang dan pasar modal (Jamal Wiwowo, 2014).

Lembaga keuangan bukan bank yang berperan dimasyarakat seperti lembaga dinas perindustrian dan perdagangan yang sifatnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan tugas yang dijalankan oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan sebagai peningkatan dan mendorong kepada masyarakat secara nyata sehingga mereka dapat mempunyai kemampuan untuk mengimplemntasikan potensinya. Dengan harapan kemandirian lokal serta terbentuknya pemberdayaan dari pemerintah, maka harapannya terjadi suatu yang kompeten dan terus berkelanjutan untuk terhindar dari masalah yang mendesak pada lingkungan sosial tersebut (Pradana et al., 2012). Dalam hal ini sangat diwajibkan untuk memberikan penekanan kepada masyarakat dengan bermuatan pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian yang harus ditingkatkan. Dengan adanya hal tersebut maka terwujudnya lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan kebaruaran masyarakat secara umum yang mandiri dengan memunuhi kebutuhan dan hajat ekonominya (Setiono Setiono, 2013).

Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah karena dari produk unggulan tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada peningkatan sumber keuangan daerah (Pradana et al., 2012).

Tabel 1. Perkembangan total UMKM di Indonesia

Tahun	Total UMKM
2015	739,8
2016	856,96
2017	942,39
2018	1 032,64
2019	1 098,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel 1.1 disajikan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan total UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar 739,8 triliun rupiah, dan tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan sebanyak 1.098,14 triliun rupiah. Hal demikian terbukti berarti ada peningkatan total UMKM dari tahun sebelumnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

Usaha mikro kecil menengah merupakan sektor usaha yang memiliki banyak variasi produk yakni mulai dari produk kebutuhan masyarakat sehari-hari berupak sumber daya alam yang dimanfaatkan serta keahlian yang di manfaatkan oleh masyarakat (Betsy Setiono, 2012). Dengan demikian perkembangan dinas perindustrian dan perdagangan di Yogyakarta diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, melalui pemberdayaan, pemanfaatan dan potensi masyarakat yang ikut serta dalam membangun usaha seperti usaha mikro kecil dan menengah. Disisi lain penelitian ini untuk memperoleh apakah sistem keuangan non bank lebih memiliki peran yang signifikan terhadap masyarakat atau tidak, tidak hanya memiliki ideologi pasar saja akan tetapi tingkat maslahatnya lebih besar kepada masyarakat yang diharapkan bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 menyatakan bahwa dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang termuat didalamnya ialah mengatur program kerja, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan teknologi industri mutu standarisasi serta peningkatan kerja

sama dan fasilitas infrastruktur (Peraturan No 57, 2018). Dengan adanya peraturan tersebut peran dinas perindustrian semakin kompatibel dalam melihat masyarakat sebagai wujud pemberdayaan baik secara internal maupun eksternal perusahaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi yang memiliki nilai-nilai masyarakat untuk pembangunan paradigma baru *people-centered, participatory*. Aspek yang didasarkan pastinya memiliki sandaran paradigmatis untuk memberdayakan masyarakat (*opowering*) dapat dijelaskan dari tiga aspek berikut (Margolang, 2018):

1. *Enabling*, yaitu menciptakan susasana yang memungkinkan hal ini dapat mewujudkan potensi masyarakat yang terus berkembang;
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang ada pada masyarakat melalui tindakan nyata yang menyangkut tentang penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam bermacam peluang yang tentunya membuat masyarakat semakin berpengaruh;
3. *Protecting*, yaitu sebagai perlindungan dan pembelaan kepentingan masyarakat yang lemah.

Dari ketiga indikator tersebut, tentunya pemberdayaan yang memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya, individu, dan demokratis sosial masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan strategi alternatif dalam pembangunan telah memiliki perkembangan dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya implementasinya belum secara maksimal dilaksanakan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tentunya menjadi perbincangan setiap saat yang tentunya memiliki kontribusi terhadap masyarakat, karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan, apalagi di kaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih minim akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Margolang, 2018).

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Menurut Arsyad (1999, h.120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu (Pradana et al., 2012):

- a. Sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.
- b. Sebagai *coordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa

melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap informasi ekonomi.

- c. Sebagai *fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) yang ada didaerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Sedangkan peran disini yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM menurut Sjaifudin (1995, h.66- 75) adalah sebagai berikut (Tulus, 2000):

1. Peningkatan Kemampuan Finansial
2. Pengembangan Pemasaran Dalam hal ini terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:
 - a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar
 - b. Proteksi pasar
 - c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian
 - a. Pengaturan dan Perijinan
 - b. Perencanaan Tata Ruang
 - c. Fungsi Kelembagaan

Usaha Kecil Menengah (UMKM)

Karakteristik UMKM

Dalam pandangan hukum dijelaskan bahwa UKM saat ini tengah pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta notaris. Adapun jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena usaha yang secara maksimal terorganisir (Pradana et al., 2012).

Untuk memaham karakteristik UKM ada beberapa yang dilihat sebagai berikut (Pradana et al., 2012):

- a. Sistem pembukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikut kaidah administrasi pembukuan standar, sering pembukuan tidak *up to date* hingga sulit untuk menilai kinerja usahanya;
- b. Margin usaha yang cenderung tipis, disebabkan persaingan yang sangat kompetitif dan tinggi;
- c. Modal yang terbatas;
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih minim;
- e. Skala ekonomi yang masih kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang;

- f. Kualitas kemampuan pemasaran dan manajemen untuk negeosisasi verifikasi yang masih terbatas;
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar masih rendah, disebabkan keterbatasan dari pihak adminstrasinya.

Strategi Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap UKM, ada beberapa startegi yang harus dikembangkan menurut (Tulus, 2000) strategi dalam pemberdayaan yang konsisten terhdap usaha industri kecil yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dengan melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro;
- b. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antara sesama usaha industri kecil maupun antar usaha menengah besar melalui kebijakan *bussines alliancie*;
- c. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan kewirausahaan dan kemampuan iptek

Upaya Pengembangan UKM

Pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut (Tulus, 2000):

- a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
- b. Bantuan permodalan
- c. Perlindungan usaha
- d. Pengembangan kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk lembaga khusus
- g. Memantapkan asosiasi
- h. Mengembangkan promosi
- i. Mengembangkan kerjasama yang setara

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bersifat deskriptif kualitatif ,yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati dalam kehidupan nyata (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Mohamad Nazir, 1998).

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian difokuskan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Masyarakat Studi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta. Sampel yang terlibat dan diwawancarai terkait dengan kegiatan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu pak Dwi

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara (interview) yang kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya (Sugiyono, 2013).

Metode Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis deskriptif kualitatif adalah wawancara mendalam (*indeptinterview*), observasi, dan mengkaji dokumen. Teknik analisa data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Langkah selanjutnya yaitu menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Printianto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pak Dwi), bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat ini sudah menjalankan undang-undang dan tugas pokok dengan baik, sebaigaman tercatat dalam peraturan No 57 tahun 2018 tentang dinas perindustrian dan perdagangan (Peraturan No 57, 2018). Selain itu tugas dari instansi tersebut adalah sebagai penyelenggara layanan *public*. Hal ini dijelaskan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasiskan pada kebutuhan masyarakat secara khusus, misalnya pelayanan tersebut adalah termasuk kategori pelaku usaha sektor industry dan perdagangan, hal tersebut karena mereka memiliki kebutuhan untuk mengembangkan usaha mereka, baik dari sisi SDM, modal serta bahan baku yang belum mampu dalam menjalankan usahanya, dan biasanya masyarakat tersebut mengajukan proposal kepada instansi dan dengan hal tersebut instansi mengetahui kebutuhan mereka, dalam pemberian tersebut perlu di ketahui apakah skil yang mereka peroleh untuk memberikan pelatihan kepada

masyarakat tersebut. Maka hal tersebut dapat di simpukan berbasikan pada idiologi dan pasar.

Di sisi lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan manfaat dengan pembinaan kepada masyarakat, melakukan pelatihan dengan pelaku usaha tersebut dari aspek produksi maupun pemasaran dalam hal memberikan fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha untuk membantu memberikan peralatan diberikan kepada mereka dengan maksud dapat meningkatkan volume produksi mereka, kemudian peningkatan dari aspek pasar instansi memberikan kepada masyarakat untuk megikutsertakan seperti iven-iven pameran baik local, nasional maupun internasional, kami juga menyelenggarakan pameran tersebut untuk mengikutsertakan mereka agar kemampuan memasarkan produk lebih meningkat. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan usaha produksi masyarakat (Dwi, 2021).

Tabel 2. Analilis SWOT

Internal		Eksternal		
No	Strategi	Weakness	Opportunity	Threats
1	Instansi menjalankan sesuai dengan UUD dan tugas pokok	SDM yang kurang	Harus berada di daerah yang banyak kampusnya perguruan tinggi, sehingga potensi sinergi untuk memberikan pelayan terhadap masyarakat lebih tinggi.	Dari masa pandemi19 ini instansi tersebut mengalami hambatan baik dalam sisi anggaran. Sehingga anggaran tersebut di Revokusing atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan, dan anggaran tersebut di alihkan oleh Pemda untuk penanganan covid 19 terlebih dahulu. Di sisi lain kami tidak optimal melakukan peminana terhadap masyarakat dan untuk revokusing itu resmi/legal karena kebijakan pemda untuk membuat pembinaan masyarakat untuk pelaku usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Walaupun lembaga konvensional tetapi implementasinya berdasarkan prinsip syariah	Disebakan <i>revokusing</i> , anggaran yang kurang optimal	Insntansi juga di dukung oleh, dua bidang yaitu, dua bidang perdagangan dan bidang industri serta 2 balai, balai pengelola teknologi dan balai pengelolaan intelektual selain pembinaan pelatihan ada juga dalam hal ini meruapakan layanan secara teknis juga diperlukan	Penerapan pola yang baru atau budaya yang baru bahwa dalam masa pandemi ini, yang biasanya bertatap muka dalam masyarakat, kemudian dibatasi, sehingga menjadi kendala tersendiri.

Sumber: diolah, 2021

Berdasarkan analisis Swot di atas bahwa Pelayanan operasional Internal maupun Eksternal sebagai berikut.

Internal

Pihak instansi telah menjalankan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, misalkan prinsip yang diterapkan walaupun instansi operasionalnya konvensional tetapi penerapan prinsip Islam selalu diterapkan, baik dalam sisi kegiatan dan konsep kinerja keseharian, adapun dalam kinerja setiap instansi perlu dievaluasi, baik yang dilakukan sendiri ataupun pihak eksternal, biasanya setiap bulan instansi mengukur kinerja secara internal yang berbasiskan pada target atau capaian terhadap target yang diperoleh baik dari kepala dinas dan kepala seksi dan kepala bidang, ada juga penilaian setiap individu pegawai tersebut biasa disebut dengan SKB, di pihak lain kami juga memiliki kekurangan SDM, alasan ini menjadi kelemahan instansi bahwa, setiap instansi harus punya daya saing kompetitif baik di bidang SDM dan produk, agar menarik perhatian masyarakat, dan perlu dievaluasi kembali untuk merekrut tenaga yang memiliki kreatifitas dan kualitas di bidangnya, faktor lain karena covid19.

Eksternal

Dari instansi tersebut melakukan survey kepuasan masyarakat, dari hal tersebut instansi bisa mengetahui seberapa banyak kepuasan masyarakat terhadap instansi tersebut, yang kedua, disebut dengan OPD (organisasi perangkat daerah) walaupun tidak masuk di lingkup instansi Dinas perindustrian dan Perdagangan tetapi masih masuk dalam lingkup Pemda, dilakukan triwulan sekali (3 bulan sekali)

Data menunjukkan bahwa, masyarakat yang kami bina adalah peningkatan kinerja yang diukur dari nilai produksi mereka, di mana nilai produksi tersebut selalu meningkat setiap tahun, sampai 2019 menunjukkan bahwa masyarakat yang kami bina mengalami peningkatan kinerja ditunjukkan dengan peningkatan nilai produksi, misalkan masyarakat yang mempunyai usaha tempe mampu memproduksi senilai 10 juta kemudian tahun depan meningkat menjadi 15 juta dan tahun berikutnya menjadi 20 juta maka, meningkat karena nilai produksinya juga meningkat dan dapat disimpulkan bahwa kinerja produksi meningkat.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki prospek untuk masa yang akan datang, oleh karena itu sampai kapanpun sektor ini akan tetap ada, maka keberadaan kami tentu sangat dibutuhkan

Dari aspek lain jika instansi mengalami penurunan baik standar kualitasnya, hal yang paling dasar adalah mencari titik permasalahan atau penyebabnya, kemudian mencari solusinya untuk peningkatan kinerja dapat di raih kembali, dan hal tersebut dengan mengantisipasi agar tidak mengalami penurunan kinerja, maka kami memiliki apa yang disebut dengan SPIPD Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan melalui sistem tersebut dapat mengidentifikasi resiko, resiko yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat menghambat pencapaian kinerja kemudian di klasifikasikan mana yang harus di selesaikan dan mana yang harus dibiarkan saja oleh nya itu tugas instansi adalah menciptakan langkah apasaja untuk meminimalisir resiko tersebut.

Dalam hal bertahan, setiap kali adalah identifikasi agar hal tersebut bisa melakukan langkah-langkah untuk di antisipasi, dan harapannya target kinerja kita tetap dapat dicapai dengan baik, sehingga terjadi penurunan terhadap kinerja.

KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta, dalam penjelasannya bahwa, instansi pemerintah telah menjalankan sesuai dengan UUD dan tugas pokok walaupun lembaga konvensional tetapi implementasinya berdasarkan prinsip syariah, misalkan kejujuran keadilan disiplin dll. Berhubungan dengan adanya covid19 maka, instansi memiliki sedikit kendala dalam operasional baik di bidang internal dan eksternal, yaitu anggaran yang tidak optimal, SDM yang minim dan pelayanan masyarakat menjadi berkurang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta, memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap masyarakat, lebih banyak evaluasi baik internal maupun eksternal, meminimal resiko ketika terjadi masalah internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Betsy Setiono. (2012). Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik, ISSN 2303*.
- Jamal Wiwowo. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Jilid 43 No. 1*.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagement, I(2), 87-99*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mohamad Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pak Dwi. (2021). *Wawancara Pegawai*.
- Peraturan No 57 2018. (2018). *peraturan gubernur daerah istimewa*



- yogyakarta nomor 57 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan.*
- Pradana, C. A. P., Domai, T., & Suwondo. (2012). UNGGULAN DAERAH (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 95–101.
- Printianto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Setiono Setiono, U. A. (2013). Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif. *FISIP Universitas Airlangga*, 1(1), 1–7.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, IKAPI.
- Tulus, T. (2000). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting. In *Jakarta, Salemba Empat*.